

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andi, Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke tiga, 2004.
- C.S.T. Kansil dan Kansil Christine S.T., *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Paramita, 2004.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Adi, 2005.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Prof. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Bambang Waluyo, S.H.,M.H, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2012.
- Made Darma Wade, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

### JURNAL

- Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, *Tentang Hukum Acara Pidana: Prosedur Penyusunan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019*.
- Novita, Ayu Ria. “*Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil tanah di desa bringin*”.

### INTERNET

- Abi Jam'an Kurnia, S.H. “Definisi Saksi Mahkota” Hukum Online.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lt55e6ba0b40629/easybiz>.  
Diunggah pada 11 Januari 2020.
- Kasus :  
<https://www.suara.com/news/2018/09/20/202643/merasa-terancam-siswa-smk-dirgantara-minta-perlindungan>. Diunggah 11 Maret 2020.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Tentang Advokat, UU No. 18 Tahun 2003.

Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 30 Tahun 1999.

Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan kelima belas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), UU No. 8 Tahun 1981.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. 2 Tahun 2002.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia, UU No. 20 Tahun 1982.

Indonesia, Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, UU No. 27 Tahun 2004.

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan kelima belas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, PP No. 2 Tahun 2002.

Putusan Mahkamah Agung No. 2437.K/Pid.Sus/2011.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Tentang Hukum Pembuktian Perkara Pidana, SE Kejaksaan No. B-69/E/02/1997 Tahun 1997.